

KONSEPTUALISASI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA**Aji Fany Permana**STAI Sufyan Tsauri Majenang
ajifanypermana@gmail.com

Abstrak: In the era of regional autonomy today, the development of rural areas occupies an urgent scale. Urgency is caused by the structure of the rural economy in general being in a disadvantage compared to the structure of the urban economy. This disproportionate situation has implications for socio-economic problems, such as inequality in the level of welfare of urban and rural communities, population density and urbanization in urban areas, which increases sharply from year to year. Therefore, how to grow and develop the economy in rural areas through the economic empowerment of its people to achieve harmony or equality with urban areas is a chore that needs to be answered immediately, especially by governments at the rural level.

Keywords: *Village, Empowerment, Economy*

Abstrak: Di era otonomi daerah dewasa ini, pengembangan wilayah pedesaan menempati skala yang urgen. Urgenitas ini disebabkan karena struktur ekonomi pedesaan pada umumnya berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan struktur ekonomi perkotaan. Keadaan yang tidak sebanding tersebut berimplikasi pada permasalahan sosial-ekonomi, seperti ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan dan pedesaan, kepadatan penduduk dan urbanisasi di perkotaan, yang dari tahun ke tahun peningkatannya semakin tajam. Oleh karena itu, bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian di pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakatnya untuk mencapai keserasian atau kesamaan dengan wilayah perkotaan adalah pekerjaan rumah yang perlu segera dijawab, terutama oleh pemerintah di tingkat pedesaan.

Kata Kunci: *Desa, Pemberdayaan, Ekonomi*

A. Pendahuluan

Pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah, tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aji Fany Permana

Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan ...

Mengingat salah satu problematika bangsa di era otonomi daerah dewasa ini adalah disparitas pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan, maka di samping kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseriusan pemerintah desa untuk memberdayakan perekonomian masyarakatnya dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan desapun kian didorong terus-menerus demi tercapainya pembangunan nasional yang adil dan merata. Persoalan kesenjangan ini memang memiliki implikasi yang serius. Berbagai persoalan sosial-ekonomi, seperti ketimpangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, serta terjadinya urbanisasi yang lebih menjanjikan secara ekonomis, akan mengalami peningkatan yang semakin tajam jika hal tersebut tidak menjadi urgenitas untuk segera diatasi.

Secara rasional, hal di atas terjadi karena masyarakat berusaha mencari tempat atau daerah yang relatif lebih potensial, baik secara kesempatan maupun ekonomis. Di sisi lain, kondisi perekonomian desa kian rapuh karena semakin berkurangnya tenaga kerja yang memilih pindah ke perkotaan dibandingkan yang bertahan pada keadaan pertanian tradisional yang kurang menghasilkan dan memberikan pendapatan secara cepat dan langsung (*quick yielding*). Keadaan tersebut cenderung dialami oleh sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini memang sulit untuk dielakkan karena percepatan mekanisme ekonomis di perkotaan pada umumnya mengalahkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Urgenitas dan pentingnya pengembangan wilayah pedesaan disebabkan karena struktur ekonomi pedesaan pada umumnya berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan struktur ekonomi perkotaan. Oleh sebab itu, bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian di pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, sekaligus upaya atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai keserasian/kesamaan dengan wilayah kota adalah pekerjaan rumah yang perlu segera dijawab, khususnya bagi pemerintah desa (Latuconsina, 2017:2).

Melalui pengembangan potensi sumber daya lokal pada sektor-sektor yang produktif, tidak sedikit desa yang berhasil dan kemudian menyandang predikat sebagai desa agrobisnis, desa wisata, desa niaga, desa pengrajin, desa minapolitan, ataupun desa industri. Dengan melihat adanya kesempatan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang besar atas terciptanya

peluang usaha dan ketersediaan lapangan pekerjaan melalui pengembangan potensi sumber daya lokal pada sektor-sektor yang produktif, semakin banyak warga masyarakat di desa-desa yang sukses, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian bekerja ataupun berwirausaha, yang lebih memilih untuk tinggal dan mencari nafkah di desanya sendiri daripada di kota.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi suatu hal yang menarik dan penting untuk dikaji lebih jauh mengenai bagaimana konsep pemberdayaan menjelaskan tentang strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), secara terminologi penelitian pustaka adalah penelitian dengan cara menelaah berbagai referensi baik berupa buku, majalah, dan catatan-catatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, secara terminologi pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan metode metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah peneliti selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teknik Pengelompokan data (*Data Clacification*), reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

C. Pembahasan

1. Strategi Pemberdayaan

a. Strategi

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr. (1995) dalam Tjiptono (1997: 3), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 (dua) perspektif yang berbeda. Pertama, dari perspektif “apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*)”. Kedua, dari perspektif “apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*)”. Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah para manajer (pengelola/pengurus) memainkan peranan aktif, sadar, dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Dalam

Aji Fany Permana

Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan ...

lingkungan yang *turbulen* dan selalu mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.

Dari pengertian atau definisi tentang strategi tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa secara umum, strategi adalah cara, siasat, atau taktik untuk melaksanakan suatu rencana yang telah disesuaikan dengan sarannya secara cermat untuk mencapai tujuan. Secara khusus, strategi merupakan suatu respon yang dilakukan oleh setiap organisasi secara terus-menerus melalui pengerahan sumber daya dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul, yang dilakukan secara adaptif dan penerapannya disesuaikan dengan situasi ataupun kondisi saat itu, baik kondisi internal organisasi maupun kondisi eksternalnya.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah penerjemahan kata dari Bahasa Inggris, yakni '*empowerment*', yang bermakna 'pemberian kekuasaan'. Oleh karena '*power*' bukan sekedar diartikan 'daya', tetapi juga merupakan 'kekuasaan', sehingga kata 'daya' tidak hanya bermakna 'mampu', namun juga mempunyai arti 'kuasa' (Tjiptono, 2007:1).

Secara umum, pemberdayaan merupakan suatu konsep yang telah melekat agar rakyat berkemampuan, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Melalui peran tersebut diharapkan muncul kesadaran dari perorangan dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat untuk meneladaninya (Usman, 2004:81).

Mardikanto (2010:73) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Pemberdayaan dari sisi sebagai penggerak roda perekonomian merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subyek pembangunan, dan jawaban atas realita ketidakberdayaan (*disempowerment*).

Dari sejumlah pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mempunyai beberapa aspek, yaitu:

- 1) Dapat memberikan kemampuan secara dasar, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi kelompok-kelompok masyarakat;
 - 2) Karena adanya upaya pembangunan, maka akan memberikan suatu kapasitas dan dapat menggerakkan berlangsungnya roda perekonomian;
 - 3) Dengan adanya upaya pemberdayaan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subyek pembangunan;
 - 4) Dengan adanya proses perubahan sosial, maka dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dan memampukan orang-orang, baik secara lokal maupun nasional;
 - 5) Dengan adanya pemberdayaan, maka dapat memberi kekuatan kepada masyarakat lemah.
- c. Bentuk dan Tujuan Pemberdayaan

Mardikanto (2010: 75-86) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk atau upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat meliputi:

1) Bina Manusia

Yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas, yaitu :

- a) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan;
- b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan
- c) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

2) Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non-ekonomi) akan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

3) Bina Lingkungan

Terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4) Bina Kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial, apabila memenuhi 4 (empat) komponen, yaitu :

- a) Komponen *person*, dimana orang-orang yang terlibat didalam suatu kelembagaan dapat teridentifikasi dengan jelas;
- b) Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut memang sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi;
- c) Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga tentang apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut;
- d) Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

d. Strategi Pemberdayaan

Priyono (2006: 170) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat terdiri dari:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok;
- 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- 4) Pengembangan usaha produktif;
- 5) Penyediaan informasi tepat guna.

Penjabaran secara lebih rinci mengenai strategi pemberdayaan, kemudian dijelaskan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 119-120), bahwa terdapat 3 (tiga) strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘daun’ dan ‘ranting’ (pemberdayaan konformis)

Struktur sosial, ekonomi dan politik dianggap *given*, pemberdayaan masyarakat hanya dilihat sebagai upaya meningkatkan daya adaptasi terhadap struktur yang sudah ada. Bentuknya berupa mengubah mental yang tidak berdaya dan pemberian bantuan, baik modal maupun subsidi. Konsep terkait strategi pemberdayaan masyarakat ini disebut sebagai ‘*Magical Paradigm*’.

- 2) Pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘batang’ (pemberdayaan reformis)

Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional, pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lembaga, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemberdayaan dengan *style* ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*. Konsep ini sering disebut sebagai ‘*Naive Paradigm*’.

- 3) Pemberdayaan yang berkuat di ‘akar’ (pemberdayaan struktural)

Ketidakterdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi kaum atau masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya, maka struktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada.

Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan/atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kalimat, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai ‘*Critical Paradigm*’. Oleh karena kesalahpahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah.

e. Tahapan dan Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dengan klien dalam *setting* pertolongan, meskipun pemberdayaan semacam ini dapat meningkatkan rasa percaya diri atau berkemampuan diri. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2-7) mengemukakan bahwa sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- *Tahap pertama*, yaitu tahap penyadaran, dimana target yang hendak diberdayakan diberi ‘pencerahan’ dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ‘sesuatu’;
- Tahap kedua adalah tahap pengkapasitasan atau *capacity building* atau *enabling*, yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan;
- Tahapan ketiga atau yang terakhir merupakan pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, ataupun peluang.

Tahapan tersebut tidak merupakan suatu kegiatan yang berhenti pada tahap mengembangkan rencana-rencana aksi dan implementasinya, namun merupakan proses yang terus-menerus, sehingga membentuk siklus yang berkesinambungan.

Selain itu, terdapat beberapa tahapan atau fase pemberdayaan yang penerapannya bersifat fleksibel dan tidak selalu linier, yaitu meliputi:

- 1) Persiapan;
- 2) Pengembangan kontak dengan klien;
- 3) Pengumpulan data;
- 4) Perencanaan dan analisis;
- 5) Bekerja dengan kelompok komunitas;
- 6) Penyadaran diri bersama untuk perubahan yang ingin dicapai;
- 7) Monitoring dan evaluasi;
- 8) Kesepakatan bersama.

2. Ekonomi Pedesaan

Dalam pembangunan pedesaan, perencanaan ekonomi dan sosial adalah merupakan prasyarat. Suatu desa dianalisis sebagai suatu sistem ekonomi dan sosial terbuka yang berhubungan dengan wilayah lain melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran komoditas dan informasi, serta mobilitas penduduk. Merupakan persoalan yang penting pula, yaitu bagaimana mengukur peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, peningkatan produksi, sumber daya pembangunan, pendapatan perkapita, serta perbaikan sistem transportasi.

Menurut Widyawati Tanudjaja (2017:2), beberapa indikator dalam pemberdayaan (pembangunan) ekonomi pedesaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa per-Kapita

Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa (atau Produksi Domestik Regional Bruto untuk tingkat kabupaten). Nilai seluruh produksi ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi, yang dihitung dengan pendekatan arus barang dan jasa akhir, tetapi dapat pula dihitung dengan menjumlahkan biaya atau penghasilan yang diperlukan untuk memproduksi output. Nilai seluruh produksi dikurangi pajak tak langsung netto dan penyusutan, maka diperoleh pendapatan pedesaan, dan jika dibagi dengan jumlah penduduk desa menjadi sama dengan pendapatan pedesaan per-Kapita.

b. Ketimpangan Pendapatan

Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang berapa persen dari total pendapatan yang diterima oleh populasi berpendapatan terendah, populasi berpendapatan sedang, dan populasi berpendapatan teratas. Dalam keadaan ekstrim, dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, maka 40 persen populasi terbawah akan menerima 40 persen dari total pendapatan, 40 persen populasi sedang (tengah) akan menerima 40 persen, dan 20 persen populasi teratas akan menerima 40 persen dari total pendapatan.

Dalam kenyataannya, tingkat ketimpangan aktual memperlihatkan bahwa 20 persen populasi terbawah hanya menerima sekitar 5 persen dari total pendapatan, 20 persen populasi kedua, ketiga, dan keempat masing-masing menerima sekitar 10 persen, 17,5 persen, dan 25 persen dari total pendapatan. Sedangkan 20 persen populasi kelima

(teratas) menikmati sekitar 42,5 persen dari total pendapatan. Gambaran ini memperlihatkan tingkat ketimpangan aktual yang tajam.

c. Perubahan Struktur Perekonomian

Di negara-negara berkembang kebanyakan menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada umumnya di masyarakat pedesaan, tingkat ketimpangan pendapatannya tidak terlalu tajam karena sebagian besar penduduknya relatif masih miskin dan homogen. Salah satu perubahan struktur perekonomian mendasarkan pada hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per-Kapita akan diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian (sektor primer), dan suatu peningkatan dalam industri manufaktur (sektor sekunder), dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier).

Menurunnya sumbangan (peranan) sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri mencerminkan perubahan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan makin kokoh, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan yang maju, yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Pada umumnya, struktur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar). Meskipun kontribusi sektor pertanian masih sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan memperlihatkan perkembangan yang nyata (seperti diterapkannya mekanisasi sistem pertanian, penggunaan bibit/benih unggul, serta sarana produksi lainnya yang lebih baik) dan telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Prospek pembangunan daerah pedesaan cukup menggembirakan pada masa depan karena orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran:

- 1) Penguatan ketahanan pangan;
- 2) Menunjang pengembangan kegiatan sektor industri;
- 3) Mendorong ekspor;
- 4) Memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar;
- 5) Mengembangkan kerjasama (keterkaitan) antar daerah pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian pedesaan (penguatan sektor industri yang makin berkembang ditopang oleh sektor pertanian yang bertambah mantap dalam rangka mengurangi ketimpangan di dalam dan antar pedesaan).

d. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Meskipun orientasi sasaran pembangunan pedesaan cukup positif, namun masih dihadapi kendala yang cukup berat, yaitu dalam permasalahan dan tantangan, terutama dalam hal kemiskinan, keterbatasan prasarana dan sarana pembangunan, keterbatasan akses kepada modal usaha dan pasar, serta arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan yang semakin besar. Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan. Perluasan lapangan kerja dapat menyerap penambahan angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

e. Tingkat Ketersediaan dan Penyebaran ‘Kemudahan’

‘Kemudahan’ yang dimaksud di sini adalah kemudahan bagi masyarakat, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (misalnya: pangan, sandang, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi, dan sebagainya) maupun kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan usaha (misalnya: memperoleh bahan baku, bahan penolong, pemasaran, dan perbankan). Tingkat kemudahan sudah mencakup pengertian aksesibilitas. Kemudahan dengan ciri-ciri seperti itu lebih banyak terdapat di kota-kota daripada di daerah-daerah pedesaan. Di perkotaan tingkat kemudahan tinggi, maka orang akan datang ke kota membawa pengalaman beserta modalnya. Dengan bertambahnya kegiatan usaha di kota, maka tingkat kemudahanpun meningkat dan daya tariknya juga makin bertambah kuat.

Kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah (wilayah) adalah tingkat kemudahan karena pemakaian kriteria pendapatan daerah (per-Kapita) ternyata tidak mudah untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah. Selain itu, pendapatan belum memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. Pendapatan yang tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Sebagai contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat PDRB per Kapita tertinggi di Indonesia, tetapi kebutuhan memperoleh jasa dokter bedah otak terpaksa harus ke Jakarta atau Surabaya.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota

Pemberdayaan ekonomi rakyat dijelaskan oleh Ginandjar Kartasmita (1996:70), bahwa pemberdayaan ekonomi adalah:

“Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”.

Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini dikalangan birokrasi pemerintah, khususnya pemerintahan desa. Meskipun uraian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep strategi pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah, khususnya pemerintahan desa. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (1999:70), konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Dikarenakan kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi sub-sistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat

D. Kesimpulan

Mengingat persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan spesifik, serta memiliki problem yang spesifik pula, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara generik memanglah penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah

Aji Fany Permana

Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan ...

pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat karena dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

Konklusi berikut bukan merupakan upaya menggeneralisasi konsep dan operasional, namun merumuskan pendekatan konsep dan operasional yang sejauh ini mungkin untuk diterapkan dengan batasan tertentu sesuai dengankerangka permasalahan dalam penelitian ini. Dari berbagai pandangan mengenai pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang telah dipaparkan oleh para pakar/konseptor/peneliti di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pemberdayaan adalah penguatan (individu ataupun masyarakat) untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan (individu ataupun masyarakat) untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan (individu ataupun masyarakat) untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam rangka memecahkan berbagai persoalan terkait kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3. Strategi pemberdayaan yang memungkinkan untuk diterapkan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan perekonomian masyarakatnya, secara umum terdiri dari 3 (tiga) jenis pilihan (opsi), tergantung karakteristik lokalnya, yaitu: *Pertama*, Strategi Pemberdayaan Konformis (*Magical Paradigm*). *Kedua*, Strategi Pemberdayaan Reformis (*Naive Paradigm*). *Ketiga*, Strategi Pemberdayaan Struktural (*Critical Paradigm*).
4. Sebagai suatu proses, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, terutama yang dilakukan oleh pemerintah desa, pada pokoknya akan menempuh tahapan atau melewati proses-proses sebagai berikut :
 - a. Tahap penyadaran.
 - b. Tahap pengkapasitasan (*capacity building* atau *enabling*).
 - c. Tahap pemberian daya itu sendiri atau *empowerment*.
5. Faktor yang menjadi pendukung, namun sekaligus juga dapat menjadi faktor penghambat, yang mungkin (biasa) ditemui dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, adalah:

- a. Faktor yang berasal dari kepribadian individu warga masyarakat desa, yang mencakup *stability, habit, primacy*, seleksi ingatan dan persepsi, *dependece*, ego, kepercayaan diri, serta *insecurity* dan *regression*.
 - b. Faktor yang berasal dari sistem sosial, yang meliputi kesepakatan terhadap norma tertentu (*conforming to norms*), kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*), kelompok kepentingan, hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*), sikap terhadap hadirnya orang luar (non-warga desa).
6. Indikator berhasil atau tidaknya sebuah upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, setidaknya dapat dilihat atau diukur dari :
- a. Rata-rata pendapatan per-Kapita masyarakat desa;
 - b. Tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok/kelas dalam masyarakat desa;
 - c. Perubahan struktur perekonomian lokal;
 - d. Pertumbuhan kesempatan kerja di desa bagi warga masyarakat lokal (hal ini berpengaruh pada tingkat urbanisasi);
 - e. Tingkat ketersediaan dan penyebaran ‘kemudahan’ di desa (dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana publik, serta kemudahan akses dalam memperoleh fasilitas dan layanan publik).

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrew, Kenneth R. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwipayana AAGN, Ari. Et.all. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Hadisaputro, S. 2008. “Badan Usaha Unit Desa dan Masalah Pembinaannya”. Dalam Jurnal Prisma Volume 4.
- Ife dan Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aji Fany Permana
Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan ...

- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Koentjaraningrat. 2009. *Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Mardikanto. 1996. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Penerbit TS.
- Priyono, K.D. 2006. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar Kepustakaan Populer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudijanto. 2010. *Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutoro, Eko. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda: Badan Diklat Provinsi Kaltim - Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Udak, Urakame. 2007. *Orang Desa, Anak Tiri Perubahan*. Malang: Averroes Press.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.